

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota tidak akan luput dari suatu fenomena yaitu pertumbuhan penduduk. Lajunya pertumbuhan penduduk akan terus berdampak kepada kebutuhan ruang yang semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan ruang tidak akan seimbang dengan keadaan ruang yang relatif tetap sehingga yang terjadi adalah semakin tingginya kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan cepat berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitas lainnya (Yunus, 2005. Hlm 56).

Permasalahan pertumbuhan penduduk ini selain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran juga disebabkan oleh arus urbanisasi yang deras. Keadaan ruang yang jumlahnya relatif tetap akan terus ditempati oleh penduduk yang jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Penduduk akan terus menempati ruang yang terbatas sehingga tidak memperhatikan lagi kualitas lingkungannya. Masalah selanjutnya yang akan terjadi adalah kemerosotan kualitas lingkungan.

Masalah kemerosotan kualitas lingkungan sejatinya akan memiliki dampak yang ditimbulkan. Pertumbuhan permukiman yang terjadi dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya diantara lain terjadinya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatnya taraf ekonomi. Namun selain itu pertumbuhan permukiman ini seiring berjalannya waktu sering dikatakan menjadi salah satu penyebab terjadinya permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan permukiman yang tidak dapat dihuni atau ditinggali karena dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang tinggal dan bermukim di dalamnya, baik dari segi keamanan terlebih lagi dari segi kesehatan (Gerald, dkk, 2015. Hlm 429). Fenomena permukiman kumuh tidak akan terlepas dari suatu perkembangan wilayah dan kota meskipun keberdaannya tidak pernah

diinginkan. Permukiman kumuh sering dikatakan sebagai pusat permasalahan di suatu kota.

Kawasan kumuh atau yang sering dikenal dengan *slum area* adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin (Asep, 2007. Hlm, 13). Kenyataan yang sering kita lihat di Indonesia kawasan kumuh menggambarkan suasana yang tidak nyaman. Dapat dilihat bahwa lingkungan tersebut tidak mampu menampung segala aktivitas yang ada. Secara sosial kawasan kumuh juga berdampak pada kesehatan masyarakat, dan juga menjadi sebab timbulnya tindakan-tindakan kriminal.

Apabila dari segi sosial permukiman kumuh berakibat pada masalah kesehatan, kejahatan dan kemiskinan, maka secara fisik permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak untuk dihuni karena berbagai masalahnya diantaranya ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi jalan lingkungan yang sempit akibat kerapatan bangunan yang tinggi berakibat pada kurangnya akses untuk mobil ambulans dan juga mobil pemadam kebakaran sebagai proteksi kebakaran. Serta minimnya sarana dan prasarana sampah akan memperparah kondisi kekumuhan lingkungan.

Masalah yang timbul baik dari segi fisik maupun sosial jika ditinjau hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan ruang. Penggunaan ruang-ruang pada permukiman kumuh tersebut berada pada suatu keadaan yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Keadaan ini mengakibatkan munculnya kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya (2016) jumlah luasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 37.188 Ha. Fenomena permukiman kumuh tidak hanya terdapat pada kota-kota metropolitan saja tetapi termasuk juga didalamnya kota-kota yang sedang berkembang. Kota Tanjungpinang adalah sebuah kota berkembang yang

tak luput dari masalah permukiman kumuh. Menurut SK Walikota No.337 tahun 2014 terdapat 7 kawasan permukiman kumuh di Tanjungpinang, yaitu kawasan Kampung Bugis, Pelantar Sulawesi, Pantai Impian, Lembah Purnama, Senggarang, Tanjung Unggat dan Sungai Nibung Angus dengan total luas permukiman kumuh yaitu 150,2 Ha.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (2016) mengatakan bahwa Tanjungpinang memiliki beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kota ini terdapat banyak permukiman kumuh yaitu diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, ketidaksanggupan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan), sanitasi yang memiliki resiko tinggi/kurang memadai, jalan lingkungan sempit dan tidak ada akses mobil pemadam kebakaran, banyaknya sampah disekitar permukiman pesisir yang kurang tertangani, ketidakteraturan bangunan serta minimnya akses air bersih yang tersedia.

Dari kondisi yang telah dipaparkan sangat wajar apabila Tanjungpinang memiliki beberapa kawasan kumuh. Sesuai dengan pemaparan UN-HABITAT dalam Gerald, dkk (2015. Hlm 430) rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup satu atap di kota dan tidak memiliki satu atau lebih dari lima kondisi, yaitu pertama rumah dari bahan permanen di lokasi yang tidak rawan bencana. Kedua area huni yang layak dimana tidak lebih dari tiga orang berbagi satu kamar. Ketiga akses ke air bersih yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam harga yang terjangkau. Keempat akses ke sanitasi yang layak. Kelima kepemilikan lahan yang aman dan legal sehingga tidak rawan penggusuran.

Terlepas dari permasalahan yang ada, sebagai kota yang sedang berkembang, Tanjungpinang beberapa tahun kebelakang ini mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Sehingga hal ini mendesak kawasan ini untuk terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan kawasan mendorong pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun buatan. Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai daya tarik tersendiri terutama bagi penduduk di perdesaan sekitar. Banyaknya penduduk yang berdatangan membuat angka kepadatan penduduk semakin tinggi. Perhatikan

tabel 1.1 laju pertumbuhan penduduk Tanjungpinang, dalam tabel berikut sangat jelas bahwa Tanjungpinang mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Bukit Bestari	54.157	58.978	59.811	1,63	1,41
2	Tanjungpinang Timur	70.867	79.513	80.984	2,10	1,85
3	Tanjungpinang Kota	17.026	17.561	17.648	0,56	0,50
4	Tanjungpinang Barat	45.309	46.163	46.292	0,33	0,28
	Tanjungpinang	187.359	202.215	204.735	1,40	1,25

(sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2017)

Seiring dengan perkembangan ekonomi, pertumbuhan fisik bangunan dan lingkungan kawasan terbangun menjadi sangat cepat. Sementara di sisi lain, regulasi untuk pengendalian dan pembangunan kawasan kota belum tersedia. Dorongan untuk berkembang dan eksploitasi potensi lokal yang ada menjadi tidak terkendali dan hanya akan berdampak negatif terhadap perkembangan kota dan kondisi sosial masyarakat di masa yang akan datang.

Selain masalah ekonomi, diduga faktor pendukung lain yang membuat Tanjungpinang memiliki beberapa kawasan permukiman kumuh yaitu karena kebiasaan masyarakatnya yang masih tradisional. Di beberapa kawasan pinggir atau pesisir Tanjungpinang dengan kondisi sanitasi lingkungan yang masih buruk membuat masyarakat membuang segala limbah rumah tangga ke laut. Kota Tanjungpinang yang masih dalam masa transisi membuat ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai disemua wilayah. Akibatnya kebiasaan masyarakat

tradisional ini masih dibawa sampai sekarang yang akan semakin memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dari berbagai masalah yang dijabarkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kekumuhan Permukiman Di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, bahwa dalam menganalisis kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Fenomena pertumbuhan penduduk merupakan hal yang lazim di Indonesia. Termasuk kota Tanjungpinang yang juga mengalami peningkatan jumlah penduduk. Fenomena peningkatan jumlah penduduk akan berakhir pada munculnya permukiman kumuh.
2. Tanjungpinang merupakan salah satu kota berkembang yang tidak luput dari fenomena permukiman kumuh, ada dua faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan di Tanjungpinang. Pertama karena kebiasaan tradisional masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke laut, kedua karena pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik membuat kaum migran semakin bertambah.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti akan menjawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan parameter-parameter permukiman kumuh?
3. Bagaimana persebaran tingkat kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.
2. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau berdasarkan parameter-parameter permukiman kumuh.
3. Menganalisis persebaran tingkat kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Bagi instansi dan pemerintah, sebagai informasi terkait pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan permukiman di Kota Tanjungpinang
2. Bagi masyarakat, sebagai informasi dan gambaran tentang pola persebaran tingkat kekumuhan permukiman di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.
3. Bagi peneliti lain, sebagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai pengembangan penelitian

E. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka pembahas sajikan dalam lima bab, dengan struktur organisasi skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi dan keaslian penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang mendukung mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini yang terdiri dari teori permukiman kumuh dan tingkat kekumuhan permukiman.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang tingkat kekumuhan permukiman Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau berdasarkan parameter tingkat kekumuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekumuhan permukiman Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini memparkan simpulan dari penelitian ini dan rekomendasi yang diharapkan berguna bagi berbagai pihak.

F. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dilihat dari tabel 1.2 pada halaman berikutnya tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Keaslian penelitian ini untuk membuktikan bahwa penelitian ini murni hasil penelitian yang dibuat oleh penulis bukan sebagai bentuk plagiarisme dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

No	Nama	Tahun	Judul	Masalah	Metode	Tujuan	Hasil
1	Irwan Kustiawan	2015	Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Pusat Kota Bandung (Kelurahan Nyengseret)	Bagaimana model penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi setempat?	Metode deskriptif kualitatif	Untuk merancang alternatif penanganan permukiman kumuh melalui analisis model/konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.	Model penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi; status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan RTRW, sehingga model penanganan yang ada adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peremajaan kota 2. Program peningkatan kualitas lingkungan permukiman
2	Dywangga Auliannisa	2009	Permukiman Kumuh di Kota Bandung	Bagaimana pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung?	Metode Deskriptif	Untuk memperoleh gambaran mengenai pola persebaran permukiman kumuh yang terdapat di Kota Bandung.	Pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung sebagian besar membentuk pola acak (<i>random pattern</i>) dan cenderung mendekati daerah-daerah pusat kegiatan seperti perdagangan dan jasa, industri, dan perkantoran. Pola mengelompok (<i>cluster pattern</i>) terdapat di Wilayah Pengembangan Bojonegara yang cenderung mendekati daerah

							perdagangan dan jasa. Pola acak (<i>random pattern</i>) terdapat di Wilayah Pengembangan Cibeuying yang tersebar mengikuti sungai serta mendekati daerah perdagangan dan jasa.
3	Agung Hadi Prasetyo	2013	Tingkat Kukumuhan Permukiman di Kecamatan Andir Kota Bandung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi fisik Kecamatan Andir berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan? 2. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi Kecamatan Andir berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan? 3. Bagaimana tingkat kekumuhan dari permukiman di Kecamatan Andir Kota Bandung 	Metode Survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi fisik Kecamatan Andir Kota Bandung berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan. 2. Mengidentifikasi kondii sosial-ekonomi Kecamatan Andir Kota Bandung berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan. 3. Menganalisis tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator permukiman tersebut menjadi kumuh jika dilihat dari kondisi fisik adalah tingkat kepemilikan tanah yang rendah, hak kepemilikan bangunan tempat tinggal masih rendah, penduduk masih mengontrak atau menumpang, seringkali terjadi kebakaran. 2. Jika dilihat dari kondisi sosial yang menjadi indikator kumuh adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendapatan yang rendah, penduduk berpendidikan rendah dan sering terjadi kriminalitas. 3. Tingkat kekumuhan Kecamatan

						kekumuhan permukiman di Kecamatan Andir Kota Bandung.	Andir berada pada angka 3. Menurut Dirjen Perumahan dan Permukiman Tahun 2001, tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Andir Kota Bandung pada kategori Kumuh Sedang.
4	Ambarwati	2016	Tingkat kekumuhan Permukiman di Kecamatan Tambora Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan kondisi fisik permukiman dengan kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 2. Bagaimana hubungan kondisi sosial-ekonomi dengan kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 3. Bagaimana tingkat kekumuhan di kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 	Metode Survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui hubungan kondisi fisik permukiman dengan kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 2. Untuk mengetahui hubungan kondisi sosial-ekonomi dengan kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tambora termasuk kriteria kumuh sedang. Indikator yang menjadikan Kecamatan Tambora menjadi kumuh adalah kondisi fisik yang menunjukkan hampir secara keseluruhan kepemilikan rumah dan lahan masyarakat merupakan milik orang lain. Masih banyak dijumpainya bangunan yang tidak layak huni di Kecamatan Tambora 2. Secara sosial ekonomi mengindikasikan bahwa lokasi penelitian merupakan kawasan kumuh terlihat dari tingkat kepadatan penduduknya yang

						Barat 3. Menganalisis tingkat kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	sangat tinggi yaitu 495 jiwa/Ha. Rata-rata anggota rumahtangga di Kecamatan Tambora berjumlah <5 orang dengan 1 KK/rumah. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi Kecamatan Tambora berada di Kelurahan Jembatan Lima yaitu 1,49%.
5	Riezky Safitri	2017	Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat? 2. Faktor-faktor apakah yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat? 	Metode Survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. 2. Menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat pada kelas kumuh sedang didominasi di Kelurahan Kranji. Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terbanyak baik itu dalam kelas kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan adalah Kelurahan Kranji dan Kelurahan Bintara. 2. Faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh adalah kesesuaian dengan tata

						permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat.	ruang yang tidak sesuai, kondisi jalan dan lingkungan yang buruk dengan jalan yang sempit <1.5 meter, <i>building coverage</i> (ruang kosong) yang terbatas, kepadatan bangunan yang padat, kondisi bangunan yang bukan merupakan bangunan permanen, kepadatan penduduk yang tinggi, potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya dukung masyarakat yang rendah.
--	--	--	--	--	--	---	--